

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap izin operasional apotek dan bagaimana bentuk sanksi administrasi yang diberikan kepada apotek yang melanggar ketentuan perizinan di Kecamatan Kota Baru. Kasus pelanggaran di apotek, seperti penjualan obat keras tanpa resep, menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya penegakan hukum di sektor ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kota Jambi dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi merupakan bentuk pengawasan yang bersifat korektif, yakni dilakukan setelah ditemukan adanya indikasi atau bukti pelanggaran izin oleh apotek. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan lapangan, pemanggilan pihak apotek, serta pemberian teguran secara administratif. Sanksi administratif yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi terhadap pelanggaran izin apotek telah sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 31–32, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan apotek, rekomendasi pencabutan izin kepada DPMPTSP. Pelaksanaan pengawasan tersebut sejalan dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada DPMPTSP, di mana kewenangan penerbitan dan pengawasan perizinan apotek telah dilimpahkan kepada DPMPTSP untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Izin Apotek

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the form of supervision of the Jambi City Regional Government in supervising pharmacy operational permits and the form of administrative sanctions imposed on pharmacies that violate licensing provisions in Kota Baru District. Cases of violations in pharmacies, such as the sale of prescription drugs without a prescription, indicate weak supervision and less than optimal law enforcement in this sector. This study used a qualitative approach using several data collection techniques such as interviews, observation, and document analysis. The results of this study indicate that the repressive supervision carried out by the local government through the Jambi City DPMPTSP and recommendations from the Jambi City Health Office is a form of corrective supervision, which is carried out after indications or evidence of permit violations by pharmacies are found. This supervision includes field inspections, summons to pharmacies, and administrative warnings. The administrative sanctions applied by the Jambi City Health Office for violations of pharmacy permits are in accordance with the provisions of the Minister of Health Regulation Number 9 of 2017 Articles 31–32, namely written warnings, temporary suspension of pharmacy activities, and recommendations for permit revocation to the DPMPTSP. The implementation of this supervision is in line with Jambi Mayor Regulation Number 2 of 2018 concerning the Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing Services from the Mayor to DPMPTSP, where the authority to issue and supervise pharmacy permits has been delegated to DPMPTSP to realize effective, efficient, and integrated public services.

Keywords: *Supervision, Local Government, Pharmacy License*